



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan ☎ (021) 723-2373 Fax. (021) 723-2373

Nomor : *KU.01-01-01/1771*
Sifat : Segera
Lampiran : -

Jakarta, *29* Februari 2012

Kepada Yth.
Bupati / Walikota
(terlampir)

Perihal : **Daftar Rincian Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPB Mandiri Perkotaan T.A. 2012**

Menindaklanjuti surat :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor B.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPB Mandiri TA.2012;
2. Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Nomor B.3055/KMK/D.VII/XI/2011 tanggal 28 Desember 2011 perihal Persetujuan Kebijakan Khusus untuk 71 kab/kota Lokasi Mandiri Perkotaan TA.2012;

Bersama ini kami sampaikan Daftar Lokasi dan Alokasi Dana BLM PNPB Mandiri Perkotaan TA. 2012 yang terdiri dari BLM Lanjutan dan BLM Reguler (*Lampiran 2*), dengan penjelasan sebagai berikut :

1. BLM Lanjutan adalah BLM yang dialokasikan untuk memenuhi kekurangan tahap pencairan sebelumnya sesuai dengan DDUB yang telah dicairkan ke masyarakat.
2. BLM Reguler TA. 2012 adalah BLM Pagu Reguler Tahun 2012, dicairkan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PNPB Mandiri Perkotaan.
3. Untuk pencairan BLM Tahapan berikutnya dapat dilakukan oleh masing-masing Kab/Kota apabila masih terdapat dana di DIPA TA. 2012 sebagai bagian dari upaya program penanggulangan kemiskinan. Lokasi sasaran akan ditetapkan kemudian berdasarkan kinerja masing-masing kelurahan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan



Tembusan Yth.

1. Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya (sebagai laporan);
2. Kepala PMU Satker P2KP;
3. Kepala Satker P2KP Pusat;
4. Kepala Satker PBL Provinsi;
5. Kepala Satker PIP Kabupaten/Kota.

Lampiran 1 Surat Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan DJCK

Nomor : KU.0101-cb/551
Tanggal : 29 Februari 2012
Perihal : Daftar Rincian Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri
Perkotaan T.A. 2012

DAFTAR TUJUAN SURAT

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

1. Bupati Aceh Selatan
2. Bupati Aceh Tenggara
3. Bupati Aceh Tengah
4. Bupati Aceh Barat
5. Bupati Aceh Besar
6. Bupati Pidie
7. Bupati Aceh Tamiang
8. Walikota Banda Aceh
9. Walikota Sabang
10. Walikota Langsa
11. Walikota Lhokseumawe
12. Walikota Subulussalam

PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Bupati Labuan Batu
2. Bupati Asahan
3. Bupati Simalungun
4. Bupati Dairi
5. Bupati Karo
6. Bupati Deli Serdang
7. Bupati Langkat
8. Walikota Sibolga
9. Walikota Tanjung Balai
10. Walikota Pematang Siantar
11. Walikota Tebing Tinggi
12. Walikota Medan
13. Walikota Binjai
14. Walikota Padangsidempuan

PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Bupati Sijunjung
2. Bupati Padang Pariaman
3. Bupati Agam
4. Bupati Lima Puluh Koto
5. Walikota Padang
6. Walikota Solok
7. Walikota Sawah Lunto
8. Walikota Padang Panjang
9. Walikota Bukittinggi
10. Walikota Payakumbuh
11. Walikota Pariaman

PROVINSI RIAU

1. Walikota Pekanbaru
2. Walikota Dumai
3. Bupati Kuantan Singingi

4. Bupati Indragiri Hilir
5. Bupati Bengkalis

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Bupati Karimun
2. Bupati Bintan
3. Walikota Batam
4. Walikota Tanjung Pinang

PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Walikota Palembang
2. Walikota Prabumulih
3. Walikota Pagar Alam
4. Walikota Lubuk Linggau
5. Bupati Ogan Komering Ulu
6. Bupati Ogan Komering Ilir
7. Bupati Muara Enim

PROVINSI JAMBI

1. Walikota Jambi
2. Walikota Sungai Penuh

PROVINSI BENGKULU

1. Bupati Bengkulu Selatan
2. Bupati Rejang Lebong
3. Walikota Bengkulu

PROVINSI BANGKA BELITUNG

1. Bupati Bangka
2. Bupati Belitung
3. Bupati Bangka Barat
4. Bupati Belitung Timur
5. Walikota Pangkal Pinang

PROVINSI LAMPUNG

1. Walikota Bandar Lampung
2. Walikota Metro
3. Bupati Pringsewu
4. Bupati Lampung Utara

PROVINSI BANTEN

1. Bupati Pandeglang
2. Bupati Lebak
3. Bupati Tangerang
4. Walikota Tangerang
5. Walikota Tangerang Selatan
6. Walikota Cilegon
7. Walikota Serang

PROVINSI DKI JAKARTA

1. Bupati Kepulauan Seribu
2. Walikota Jakarta Selatan
3. Walikota Jakarta Timur
4. Walikota Jakarta Pusat
5. Walikota Jakarta Barat
6. Walikota Jakarta Utara

PROVINSI JAWA BARAT

1. Bupati Sukabumi
2. Bupati Cianjur
3. Bupati Bandung

4. Bupati Tasikmalaya
5. Bupati Majalengka
6. Bupati Purwakarta
7. Bupati Karawang
8. Walikota Bogor
9. Walikota Sukabumi
10. Walikota Bandung
11. Walikota Cirebon
12. Walikota Bekasi
13. Walikota Depok
14. Walikota Cimahi
15. Walikota Tasikmalaya
16. Walikota Banjar
17. Bupati Sumedang
18. Bupati Subang
19. Bupati Bandung Barat
20. Bupati Indramayu
21. Bupati Kuningan
22. Bupati Ciamis
23. Bupati Garut
24. Bupati Cirebon
25. Bupati Bekasi
26. Bupati Bogor

PROVINSI JAWA TENGAH

1. Bupati Cilacap
2. Bupati Banyumas
3. Bupati Purbalingga
4. Bupati Banjar Negara
5. Bupati Purworejo
6. Bupati Wonosobo
7. Bupati Magelang
8. Bupati Klaten
9. Bupati Karanganyar
10. Bupati Grobogan
11. Bupati Blora
12. Bupati Rembang
13. Bupati Kudus
14. Bupati Jepara
15. Bupati Demak
16. Bupati Temanggung
17. Bupati Pekalongan
18. Bupati Pemasang
19. Bupati Tegal
20. Bupati Brebes
21. Walikota Magelang
22. Walikota Surakarta
23. Walikota Salatiga
24. Walikota Semarang
25. Walikota Pekalongan
26. Walikota Tegal
27. Bupati Pati
28. Bupati Batang
29. Bupati Kebumen
30. Bupati Wonogiri
31. Bupati Boyolali

32. Bupati Semarang
33. Bupati Kendal
34. Bupati Sragen
35. Bupati Sukoharjo

PROVINSI DI YOGYAKARTA

1. Bupati Kulon Progo
2. Bupati Bantul
3. Bupati Sleman
4. Walikota Yogyakarta

PROVINSI JAWA TIMUR

1. Bupati Pacitan
2. Bupati Ponorogo
3. Bupati Trenggalek
4. Bupati Malang
5. Bupati Lumajang
6. Bupati Probolinggo
7. Bupati Pasuruan
8. Bupati Sidoarjo
9. Bupati Nganjuk
10. Bupati Madiun
11. Bupati Magetan
12. Bupati Bojonegoro
13. Bupati Tuban
14. Bupati Lamongan
15. Bupati Gresik
16. Bupati Pamekasan
17. Walikota Kediri
18. Walikota Blitar
19. Walikota Malang
20. Walikota Probolinggo
21. Walikota Pasuruan
22. Walikota Mojokerto
23. Walikota Madiun
24. Walikota Surabaya
25. Walikota Batu
26. Bupati Banyuwangi
27. Bupati Sumenep
28. Bupati Kediri
29. Bupati Tulungagung
30. Bupati Blitar
31. Bupati Bangkalan
32. Bupati Bondowoso
33. Bupati Jombang
34. Bupati Mojokerto
35. Bupati Jember
36. Bupati Situbondo

PROVINSI BALI

1. Bupati Badung
2. Bupati Gianyar
3. Bupati Klungkung
4. Kab Buleleng
5. Walikota Denpasar

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. Bupati Lombok Tengah
2. Bupati Lombok Timur
3. Walikota Mataram
4. Walikota Bima
5. Bupati Lombok Barat
6. Bupati Sumbawa

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1. Bupati Sumba Barat
2. Bupati Sumba Timur
3. Bupati Ende
4. Walikota Kupang
5. Bupati Timor Tengah Selatan
6. Bupati Belu
7. Bupati Sikka
8. Bupati Ngada
9. Bupati Manggarai

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Bupati Sambas
2. Bupati Bengkayang
3. Walikota Pontianak
4. Walikota Singkawang
5. Bupati Ketapang

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. Bupati Kotawaringin Timur
2. Walikota Palangkaraya

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. Bupati Tanah Laut
2. Bupati Hulu Sungai Selatan
3. Bupati Hulu Sungai Tengah
4. Bupati Tabalong
5. Walikota Banjarmasin
6. Walikota Banjar Baru
7. Bupati Kota Baru
8. Bupati Banjar
9. Bupati Barito Kuala
10. Bupati Hulu Sungai Utara

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Bupati Pasir
2. Bupati Kutai Kertanegara
3. Bupati Berau
4. Bupati Bulungan
5. Walikota Balikpapan
6. Walikota Samarinda
7. Walikota Tarakan
8. Walikota Bontang
9. Bupati Malinau
10. Bupati Nunukan

PROVINSI SULAWESI UTARA

1. Bupati Kepulauan Sangihe
2. Bupati Minahasa Utara
3. Walikota Manado

4. Walikota Bitung
5. Walikota Tomohon
6. Walikota Kotamobagu
7. Bupati Minahasa

PROVINSI GORONTALO

1. Bupati Gorontalo

PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. Bupati Poso
2. Bupati Toli-Toli
3. Walikota Palu

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Bupati Muna
2. Walikota Kendari
3. Walikota Bau-Bau
4. Bupati Kolaka

PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Bupati Selayar
2. Bupati Bantaeng
3. Bupati Sinjai
4. Bupati Maros
5. Bupati Wajo
6. Bupati Sidendreng Rappang
7. Walikota Pare-Pare
8. Walikota Palopo
9. Walikota Makasar
10. Bupati Bulukumba
11. Bupati Gowa
12. Bupati Bone
13. Bupati Pinrang
14. Bupati Toraja Utara

PROVINSI SULAWESI BARAT

1. Bupati Majene
2. Bupati Polewali Mandar

PROVINSI MALUKU

1. Walikota Ambon
2. Walikota Tual
3. Bupati Maluku Tengah

PROVINSI MALUKU UTARA

1. Walikota Ternate
2. Walikota Tidore Kepulauan

PROVINSI PAPUA

1. Walikota Jayapura

PROVINSI PAPUA BARAT

1. Bupati Manokwari
2. Walikota Sorong